



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2015, maka dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara 23 Tahun 2014 telah ditetapkan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2015,;
 - b. bahwa agar pelaksanaan program dan kegiatan pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan maka perlu melakukan pergeseran anggaran, baik antar Rincian Objek Belanja dan antar Objek Belanja
 - c. bahwa dengan terbitnya Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, pelaksanaan program dan kegiatan yang belum cukup tersedia dan/ atau belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d , perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
28. Peraturan Bupati Kolaka Utara nomor 23 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA ATAS PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2014 Nomor 23) di ubah sebagai berikut :

I. Lampiran I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 di ubah sehingga berbunyi :

a)	Pendapatan		
1.	Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp	35.075.871.794,-
2.	Dana Perimbangan sejumlah	Rp	589.965.922.000,-
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah sejumlah	Rp	<u>119.763.919.101,-</u>
	Jumlah Pendapatan	Rp	744.805.712.895,-
b)	Belanja		
1.	Belanja Tidak Langsung		
a.	Belanja Pegawai sejumlah	Rp	241.062.451.065,-
b.	Belanja Bunga sejumlah	Rp	0,-
c.	Belanja Subsidi sejumlah	Rp	0,-
d.	Belanja Hibah sejumlah	Rp	6.953.000.000,-
e.	Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp	500.000.000,-
f.	Belanja Bagi Hasil sejumlah	Rp	0,-
g.	Belanja Bantuan Keuangan sejumlah	Rp	71.088.760.000,-
h.	Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp	<u>3.500.000.000,-</u>
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	323.104.211.065,-

2.	Belanja Langsung		
a.	Belanja Pegawai sejumlah	Rp	46.091.361.731,-
b.	Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp	116.499.346.356,-
c.	Belanja Modal sejumlah	Rp	<u>361.012.916.428.-</u>
	Jumlah Belanja Langsung	Rp	<u>523.603.624.515.-</u>
	Total Belanja	Rp	846,707.835.580,-
	Surplus/ (Defisit)	Rp	(101.902.122.685,-)

c)	Pembiayaan		
1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	112.377.900.000,-
2.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>10.475.777.315.-</u>
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	101.902.122.685,-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp	0,-

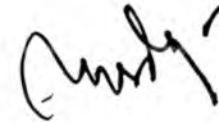
II. *Lampiran II diubah dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.*

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Ditetapkan di Lasusua
Pada Tanggal, 09 Juni 2015

BUPATI KOLAKA UTARA



RUSDA MAHMUD

Diundangkan di : Lasusua
Pada tanggal : 09 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2015 NOMOR ...4.....

Lampiran I : Peraturan Bupati Nomor Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
 Nomor
 Tanggal

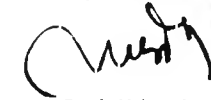
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
 RINGKASAN PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	744,805,712,895.00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	35,075,871,794.00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5,480,000,000.00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3,361,200,000.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,000,000,000.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	19,234,671,794.00
1.2	DANA PERIMBANGAN	589,965,922,000.00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30,000,000,000.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	451,597,322,000.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	108,368,600,000.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	119,763,919,101.00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	10,241,227,708.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	54,419,381,000.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2,220,000,000.00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	52,883,310,393.00
2	BELANJA	846,707,835,580.00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	323,104,211,065.00
2.1.1	Belanja Pegawai	241,062,451,065.00
2.1.4	Belanja Hibah	6,953,000,000.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	500,000,000.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	71,088,760,000.00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3,500,000,000.00

1	2	3
2.2	BELANJA LANGSUNG	523,603,624,515.00
2.2.1	Belanja Pegawai	46,091,361,731.00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116,499,346,356.00
2.2.3	Belanja Modal	361,012,916,428.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(101,902,122,685.00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	112,377,900,000.00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	13,438,000,000.00
	SILPA	5,838,000,000.00
	Penerimaan Retensi	7,600,000,000.00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	98,939,900,000.00
3.2	PENGELOMPOKAN PEMBIAYAAN DAERAH	10,475,777,315.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,000,000,000.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	9,475,777,315.00
	PEMBIAYAAN NETTO	101,902,122,685.00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		-

LASUSUA, 09 Juni 2015

Bupati Kolaka Utara



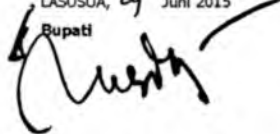
Rusda Mahmud

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA					
PERUBAHAN PENJABARAN APBD					
TAHUN ANGGARAN 2015					
Urusan Pemerintahan	1.2	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian			
Organisasi	1.20.50	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
Sub Unit Organisasi	1.20.50.02	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/(Berkurang)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.05.00.00.4	PENDAPATAN	684,922,757,881	722,729,841,101	37,807,083,220	
1.20.1.20.05.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	13,000,000,000	13,000,000,000	-	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,000,000,000	7,000,000,000	-	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	7,000,000,000	7,000,000,000	-	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	7,000,000,000	7,000,000,000	-	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6,000,000,000	6,000,000,000	-	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	5,700,000,000	5,700,000,000	-	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	5,700,000,000	5,700,000,000	-	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	250,000,000	250,000,000	-	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.10.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	50,000,000	50,000,000	-	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.10.04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	200,000,000	200,000,000	-	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.17	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	20,000,000	20,000,000	-	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.17.01	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	20,000,000	20,000,000	-	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	30,000,000	30,000,000	-	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	30,000,000	30,000,000	-	
1.20.1.20.05.00.00.4.2	DANA PERIMBANGAN	579,388,822,000	589,965,922,000	10,577,100,000	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30,000,000,000	30,000,000,000	-	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	9,633,610,833	9,633,610,833	-	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	7,133,610,833	7,133,610,833	-	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	20,366,389,167	20,366,389,167	-	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02.01	Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	1,165,368,656	1,165,368,656	-	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02.03	Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi	150,000,000	150,000,000	-	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	396,556,000	396,556,000	-	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	18,364,726,080	18,364,726,080	-	

1	2	3	4	5	6
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	289,738,431	289,738,431	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	451,597,322,000	451,597,322,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01	Dana Alokasi Umum	451,597,322,000	451,597,322,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 01	Dana Alokasi Umum	451,597,322,000	451,597,322,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	97,791,500,000	108,368,600,000	10,577,100,000	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01	Dana Alokasi Khusus (DAK)	97,791,500,000	108,368,600,000	10,577,100,000	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 01	DAK Bidang Pendidikan	27,555,780,000	27,555,780,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 02	DAK Bidang Kesehatan	8,342,470,000	8,342,470,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	15,769,920,000	15,769,920,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 04	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	7,368,960,000	7,368,960,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	3,255,130,000	3,255,130,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 06	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	3,673,230,000	3,673,230,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 08	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	6,210,930,000	6,210,930,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 09	DAK Bidang Pertanian	4,631,610,000	15,208,710,000	10,577,100,000	Transfer APBN-P Tahun 2015
					Tambahan Tranfer Penerimaan DAK (TAMBAHAN P2K3)
					1 Tahun x 10.577.100.000,-
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 10	DAK Bidang Lingkungan Hidup	1,405,030,000	1,405,030,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 11	DAK Bidang Keluarga Berencana	1,773,780,000	1,773,780,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 12	DAK Bidang Kehutanan	1,393,510,000	1,393,510,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 13	DAK Bidang Sarana Prasarana Pedesaan	6,108,920,000	6,108,920,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 14	DAK Bidang Perdagangan	2,098,120,000	2,098,120,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 15	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat	465,840,000	465,840,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 16	DAK Bidang Listrik Pedesaan	3,880,050,000	3,880,050,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 19	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	3,858,220,000	3,858,220,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	92,533,935,881	119,763,919,101	27,229,983,220	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	10,241,227,708	10,241,227,708	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	5,500,000,000	5,500,000,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	900,000,000	900,000,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2,400,000,000	2,400,000,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2,200,000,000	2,200,000,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 02	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	4,741,227,708	4,741,227,708	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 02 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	4,741,227,708	4,741,227,708	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	54,419,381,000	54,419,381,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01	Dana Penyesuaian	54,419,381,000	54,419,381,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 01	Tunjangan Profesi Guru PNSD	34,055,540,000	34,055,540,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1,581,000,000	1,581,000,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 03	Dana Insentif Daerah	18,782,841,000	18,782,841,000	-	

1	2	3	4	5	6
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2,220,000,000	2,220,000,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 . 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	2,220,000,000	2,220,000,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 . 01 . 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi ...	2,220,000,000	2,220,000,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 6	Pendapatan Lainnya	25,653,327,173	52,883,310,393	27,229,983,220	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 6 . 01	Pendapatan Lainnya	25,653,327,173	52,883,310,393	27,229,983,220	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 6 . 01 . 01	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga	25,653,327,173	52,883,310,393	27,229,983,220	Transfer APBN-P Tahun 2015 Tambahan Pagu Transfer ADD Pusat sebesar Rp. 27.229.983.220,00dari Pagu Awal sebesar Rp. 7.616.495.780,- menjadi Rp. 34.864.479.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5	BELANJA	54,811,776,780	82,041,760,000	27,229,983,220	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	54,811,776,780	82,041,760,000	27,229,983,220	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00	Non Keglitan	54,811,776,780	82,041,760,000	27,229,983,220	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4	Belanja Hibah	6,953,000,000	6,953,000,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	3,683,000,000	3,683,000,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi.....	3,683,000,000	3,683,000,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	3,270,000,000	3,270,000,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 06 . 01	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	3,270,000,000	3,270,000,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	500,000,000	500,000,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat ...	300,000,000	300,000,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 02 . 01	Belanja Bantuan Sosial Kepada ...	300,000,000	300,000,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat ...	200,000,000	200,000,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03 . 01	Belanja Bantuan Sosial Kepada ...	200,000,000	200,000,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	43,858,776,780	71,088,760,000	27,229,983,220	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi	160,000,000	160,000,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 01 . 01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi ...	160,000,000	160,000,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	375,000,000	375,000,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa ...	375,000,000	375,000,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya	42,806,295,780	70,036,279,000	27,229,983,220	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	42,806,295,780	70,036,279,000	27,229,983,220	Transfer APBN-P Tahun 2015 Tambahan Pagu Belanja ADD Pusat sebesar Rp. 27.229.983.220,00dari Pagu Awal sebesar Rp. 7.616.495.780,- menjadi Rp. 34.864.479.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	517,481,000	517,481,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	517,481,000	517,481,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	3,500,000,000	3,500,000,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tak Terduga	3,500,000,000	3,500,000,000	-	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	3,500,000,000	3,500,000,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)

1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	630,110,981,101	640,688,081,101	10,577,100,000	
1.20.1.20.05.00.00.6	PEMBIAYAAN DAERAH				
1.20.1.20.05.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	112,377,900,000	112,377,900,000	-	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	13,438,000,000	13,438,000,000	-	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.05	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	7,600,000,000	7,600,000,000	-	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.05.01	Uang Jaminan ...	7,600,000,000	7,600,000,000	-	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	5,838,000,000	5,838,000,000	-	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	5,838,000,000	5,838,000,000	-	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	98,939,900,000	98,939,900,000	-	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.4.04	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	98,939,900,000	98,939,900,000	-	
1.20.1.20.05.00.00.6.1.4.04.01	Lembaga Keuangan Bukan Bank ...	98,939,900,000	98,939,900,000	-	
1.20.1.20.05.00.00.6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10,475,777,315	10,475,777,315	-	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada Bank	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	9,475,777,315	9,475,777,315	-	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.3.04	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	9,475,777,315	9,475,777,315	-	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.3.04.01	Lembaga Keuangan Bukan Bank ...	9,475,777,315	9,475,777,315	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	101,902,122,685	101,902,122,685	-	

LASUSUA, 09 Juni 2015
 Bupati

 Rusda Mahmud

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA					
PERUBAHAN PENJABARAN APBD					
TAHUN ANGGARAN 2015					
Urusan Pemerintahan	2.01	Urusan Pilihan Pertanian			
Organisasi	2.1. 01	Dinas Pertanian dan Peternakan			
Sub Unit Organisasi	2. 01 . 01 . 01	Dinas Pertanian dan Peternakan			
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/berkurang	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	10,000,000	10,000,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	10,000,000	10,000,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	10,000,000	10,000,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	10,000,000	10,000,000	-	Retribusi Pemotongan Hewan
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 18	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	10,000,000	10,000,000	-	(Perda No 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha)
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	6,569,313,939	17,146,413,939	10,577,100,000	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,387,343,939	1,387,343,939	-	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Non Kegiatan	1,387,343,939	1,387,343,939	-	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Pegawai	1,387,343,939	1,387,343,939	-	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1,387,343,939	1,387,343,939	-	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	5,181,970,000	15,759,070,000	10,577,100,000	
2.01 . 2.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	595,957,500	595,957,500	-	Penambahan Pagu Belanja Langsung sebesar Rp. 10.577.100.000 dari Pagu sebelumnya sebesar Rp. 5.181.970.000
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa surat menyurat	467,500	467,500	-	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	467,500	467,500	-	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakal Habis	267,500	267,500	-	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	267,500	267,500	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200,000	200,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	200,000	200,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	37,400,000	37,400,000	-	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37,400,000	37,400,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37,400,000	37,400,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6,000,000	6,000,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	5,600,000	5,600,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	25,800,000	25,800,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	44,850,000	44,850,000	-	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44,850,000	44,850,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	44,850,000	44,850,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4,500,000	4,500,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30,000,000	30,000,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10,350,000	10,350,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	57,600,000	57,600,000	-	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	57,600,000	57,600,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6,600,000	6,600,000	-	

1	2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Pengelola Barang
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 07	Honorarium Pengelola Keuangan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa kebersihan kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Sampah
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Penjilidan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 08	Honorarium Pengelola Kegiatan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Honorarium Pengelola Sistem Aplikasi
2.01 . 2.01.01 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran
2.01 . 2.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai

3	4	5	6
6,600,000	6,600,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
51,000,000	51,000,000	-	-
51,000,000	51,000,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2,417,500	2,417,500	-	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2,417,500	2,417,500	-	-
1,817,500	1,817,500	-	-
1,817,500	1,817,500	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
600,000	600,000	-	-
600,000	600,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
13,785,500	13,785,500	-	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
13,785,500	13,785,500	-	-
13,785,500	13,785,500	-	-
13,785,500	13,785,500	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
7,430,000	7,430,000	-	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
7,430,000	7,430,000	-	-
7,430,000	7,430,000	-	-
750,000	750,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
5,880,000	5,880,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
800,000	800,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
10,800,000	10,800,000	-	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
10,800,000	10,800,000	-	-
10,800,000	10,800,000	-	-
10,800,000	10,800,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
10,000,000	10,000,000	-	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
10,000,000	10,000,000	-	-
10,000,000	10,000,000	-	-
10,000,000	10,000,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
40,400,000	40,400,000	-	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
40,400,000	40,400,000	-	-
40,400,000	40,400,000	-	-
24,000,000	24,000,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
16,400,000	16,400,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
173,857,000	173,857,000	-	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
173,857,000	173,857,000	-	-
173,857,000	173,857,000	-	-
173,857,000	173,857,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
90,350,000	90,350,000	-	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
90,350,000	90,350,000	-	-
90,350,000	90,350,000	-	-
90,350,000	90,350,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
70,600,000	70,600,000	-	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
70,600,000	70,600,000	-	-
12,600,000	12,600,000	-	-
12,600,000	12,600,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
57,300,000	57,300,000	-	-
57,300,000	57,300,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
700,000	700,000	-	-
700,000	700,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
36,000,000	36,000,000	-	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
36,000,000	36,000,000	-	-

1	2	3	4	5	6
2.01 . 2.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	36,000,000	36,000,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	36,000,000	36,000,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	206,250,000	206,250,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	33,000,000	33,000,000	-	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	33,000,000	33,000,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	33,000,000	33,000,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	33,000,000	33,000,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	55,000,000	55,000,000	-	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1,700,000	1,700,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1,700,000	1,700,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Kelengkapan Dekorasi	500,000	500,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Kelengkapan Perayaan Hari-Hari Besar	1,200,000	1,200,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	53,300,000	53,300,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	13,800,000	13,800,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	9,000,000	9,000,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor	4,800,000	4,800,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	16,500,000	16,500,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	8,000,000	8,000,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8,500,000	8,500,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	20,000,000	20,000,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20,000,000	20,000,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	3,000,000	3,000,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	3,000,000	3,000,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	28,000,000	28,000,000	-	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	28,000,000	28,000,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	28,000,000	28,000,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	28,000,000	28,000,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	90,250,000	90,250,000	-	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90,250,000	90,250,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	90,250,000	90,250,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,400,000	3,400,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	86,850,000	86,850,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparat	42,340,000	42,340,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 05	Pengadaan pakalan khusus hari-hari tertentu	42,340,000	42,340,000	-	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42,340,000	42,340,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	24,840,000	24,840,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harlan (PDH)	24,840,000	24,840,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17,500,000	17,500,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	17,500,000	17,500,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	59,296,000	59,296,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	59,296,000	59,296,000	-	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59,296,000	59,296,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35,296,000	35,296,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35,296,000	35,296,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	24,000,000	24,000,000	-	

1	2
2.01 . 2.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Kontribusi Kursus/Pelabhan/Bimtek
2.01 . 2.01.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
	dan keuangan
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan lkhltisar realisasi kinerja SKPD
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01	Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pengelola Kegiatan
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 08	Honorarium Pengelola Sistem Aplikasi
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2.01 . 2.01.01 . 15	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01	Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Bahan/Material
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Jasa Kantor
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Dokumentasi
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Cetak dan Penggandaan
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Penggandaan
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Makanan dan Minuman
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja makanan dan minuman Pelatihan
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Perjalanan Dinas
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Jasa Profesi
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Peningkatan kemampuan lembaga petani
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03	Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Jasa Kantor
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Dokumentasi
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Cetak dan Penggandaan
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Penggandaan
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Penginapan
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Makanan dan Minuman
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja makanan dan minuman Pelatihan
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Perjalanan Dinas
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	

3	4	5	6
24,000,000	24,000,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
9,200,000	9,200,000	-	
9,200,000	9,200,000	-	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
9,200,000	9,200,000	-	
5,600,000	5,600,000	-	
5,600,000	5,600,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
3,600,000	3,600,000	-	
3,600,000	3,600,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
135,145,000	135,145,000	-	
54,495,000	54,495,000	-	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2,100,000	2,100,000	-	
2,100,000	2,100,000	-	
2,100,000	2,100,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
52,395,000	52,395,000	-	
1,125,000	1,125,000	-	
1,125,000	1,125,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
770,000	770,000	-	
770,000	770,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
500,000	500,000	-	
500,000	500,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2,000,000	2,000,000	-	
1,500,000	1,500,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
500,000	500,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
1,500,000	1,500,000	-	
1,500,000	1,500,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
20,250,000	20,250,000	-	
20,250,000	20,250,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
20,250,000	20,250,000	-	
20,250,000	20,250,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
6,000,000	6,000,000	-	
6,000,000	6,000,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
80,650,000	80,650,000	-	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1,500,000	1,500,000	-	
1,500,000	1,500,000	-	
1,500,000	1,500,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
79,150,000	79,150,000	-	
2,750,000	2,750,000	-	
2,750,000	2,750,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
250,000	250,000	-	
250,000	250,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
1,800,000	1,800,000	-	
300,000	300,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
1,500,000	1,500,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
20,850,000	20,850,000	-	
18,850,000	18,850,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2,000,000	2,000,000	-	
21,600,000	21,600,000	-	
21,600,000	21,600,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
25,100,000	25,100,000	-	

1	2	3	4	5	6
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25,100,000	25,100,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Profesi	6,800,000	6,800,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur	6,800,000	6,800,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	3,104,326,500	13,681,426,500	10,577,100,000	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	28,765,000	28,765,000	-	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1,625,000	1,625,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1,625,000	1,625,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,625,000	1,625,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27,140,000	27,140,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20,000,000	20,000,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	20,000,000	20,000,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7,140,000	7,140,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,140,000	7,140,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	188,433,000	188,433,000	-	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	188,433,000	188,433,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	188,433,000	188,433,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	188,433,000	188,433,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 13	Pengembangan cadangan pangan daerah	148,945,000	148,945,000	-	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148,945,000	148,945,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	148,945,000	148,945,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	148,945,000	148,945,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	181,685,000	181,685,000	-	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14,400,000	14,400,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9,300,000	9,300,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,300,000	6,300,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1,500,000	1,500,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	1,500,000	1,500,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5,100,000	5,100,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	5,100,000	5,100,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	167,285,000	167,285,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakal Habis	725,000	725,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	725,000	725,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	150,275,000	150,275,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	114,125,000	114,125,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	36,150,000	36,150,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16,285,000	16,285,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,775,000	6,775,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,510,000	9,510,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 20	Pengembangan perbenihan/perbibitan	82,951,000	82,951,000	-	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18,000,000	18,000,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11,100,000	11,100,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,100,000	8,100,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1,500,000	1,500,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	1,500,000	1,500,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6,900,000	6,900,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	6,900,000	6,900,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64,951,000	64,951,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakal Habis	500,000	500,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500,000	500,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	29,370,000	29,370,000	-	

1	2	3	4	5	6
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11,700,000	11,700,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,600,000	9,600,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1,050,000	1,050,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa	1,050,000	1,050,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40,400,000	40,400,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	26,400,000	26,400,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Insentif	14,000,000	14,000,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64,241,000	64,241,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,034,000	2,034,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,004,000	2,004,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30,000	30,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	45,371,000	45,371,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	42,961,000	42,961,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan Kelengkapan Medis	2,410,000	2,410,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	326,000	326,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	326,000	326,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16,510,000	16,510,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,000,000	7,000,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,510,000	9,510,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 21 . 07	Pembangunan Penampungan Hewan	200,000,000	200,000,000	-	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6,900,000	6,900,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6,900,000	6,900,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6,900,000	6,900,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	193,100,000	193,100,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	193,100,000	193,100,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	193,100,000	193,100,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	549,954,000	549,954,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 01	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	59,350,000	59,350,000	-	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	59,350,000	59,350,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	59,350,000	59,350,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 11 . 06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Peternakan	59,350,000	59,350,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 22 . 03	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	490,604,000	490,604,000	-	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	490,604,000	490,604,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50,000,000	50,000,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	50,000,000	50,000,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	440,604,000	440,604,000	-	
2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	440,604,000	440,604,000	-	Dana Alokasi Umum (D A U)
	SURPLUS / (DEFISIT)	5,181,970,000	15,759,070,000	10,577,100,000	

LASUSUA, 9 Juni 2015
Bupati Kolaka Utara


Rusda Mahmud